

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN CIBANGKONG (STUDI PADA KAMPUNG KB NGAHIJI CIBANGKONG, KOTA BANDUNG)

¹Fanny Fairuz Nazneen

² Wahju Gunawan

³Jovanscha Qisty Adinda FA

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Sosiologi, Universitas Padjadjaran

³¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: fanny18004@mail.unpad.ac.id

wahjugunawan

jovanscha@unpad.ac.id

Abstract

Factors that can cause poverty in Indonesia include: the fact that there are still many areas in Indonesia that are isolated as a result of topography and accessibility conditions, resulting in difficulty accessing basic services, powerlessness, low-quality human resources, low investment, and the impact of disasters and climate change. Apart from the need for equitable distribution of development in every corner of the regions in Indonesia, another factor that needs to be addressed in alleviating poverty is the community.

This study aims to find out and describe how the implementation of community empowerment took place in Kampung KB Ngahiji Cibangkong. The research method used was descriptive and qualitative to describe the actual conditions of community empowerment in Ngahiji Cibangkong KB Village. The data collection techniques used are interviews, observation, literature review, and documentation. The results of this study indicate that community empowerment in Kampung KB Ngahiji Cibangkong is well implemented. However, it is necessary to optimize the empowering aspect because the community is not aggressive enough to carry out community empowerment through economic activities. For this reason, it is necessary to engage in active promotion so that community empowerment activities are carried out more properly. The results of the SWOT identification have strengths and opportunities that can be an advantage over existing weaknesses and threats, so that they have a good impact on the continuation of the implementation of community empowerment in the Ngahiji Cibangkong KB Village.

Keywords: *Community empowerment, Kampung KB.*

Abstrak

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah : masih banyak daerah di Indonesia yang terisolasi sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas, sulitnya akses layanan dasar, ketidakberdayaan, kualitas SDM rendah, rendahnya investasi masuk, dan dampak dari bencana maupun perubahan iklim yang dapat menyebabkan kemiskinan. Selain perlu adanya pemerataan pembangunan di setiap pelosok daerah-daerah di Indonesia, faktor lain yang perlu dibenahi dalam pengentasan kemiskinan adalah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong. Metode Penelitian yang digunakan ada kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong ini terlaksana dengan baik. Namun, perlu pengoptimalan kembali pada aspek empowering dikarenakan masyarakat yang kurang gencar dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan kembali, giat promosi agar kegiatan pemberdayaan masyarakat semakin terlaksana dengan baik. Hasil Identifikasi SWOT memiliki kekuatan dan peluang yang dapat menjadi keunggulan atas kekurangan dan ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kampung KB

Latar Belakang

Kependudukan per Desember 2021 menyatakan jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 273.879.750 jiwa dengan persebaran penduduk terbanyak berada di Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Barat sebanyak 48.220.094 jiwa, terdapat kenaikan sebanyak 2.529.861 jiwa dibandingkan pada saat tahun 2020. Disusul dengan jumlah kemiskinan penduduk di Indonesia yang mencapai 26,50 juta orang atau sekitar 9,71% dari jumlah populasi keseluruhan penduduk di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Bangsa Indonesia kedepannya akan menghadapi permasalahan

jumlah penduduk yang sangat besar, kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah. yang tersebar tersebut beserta dengan tingkat kemiskinannya perlu dikendalikan, mengingat masyarakat merupakan elemen penting dalam suatu pembangunan di negara.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah : masih banyak daerah di Indonesia yang terisolasi sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas, sulitnya akses layanan dasar, ketidakberdayaan, kualitas SDM rendah, rendahnya investasi masuk, dan dampak dari bencana maupun perubahan iklim. Selain perlu adanya pemerataan pembangunan di setiap pelosok daerah-daerah di Indonesia,

faktor lain yang perlu dibenahi dalam pengentasan kemiskinan adalah masyarakat. Faktor tersebut berkaitan dengan kualitas SDM yang mana merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi maupun suatu keberlangsungan pembangunan, dikarenakan satu sama lain saling memiliki korelasi terhadap kuatnya suatu struktur ekonomi dan pembangunan di negara.

Kehadiran Kampung KB merupakan salah satu inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pemikiran serta tindakan dari manusia yang bermanfaat bagi kehidupan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Keberadaan inovasi tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan terhadap pengetahuan, keterampilan, kekuatan, keuangan, penghasilan, prosedur, mekanisme dan lain-lain. Sehingga dengan adanya inovasi maka akan menghasilkan kebaruan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan input, proses, dan output.

Pada tahun 2015 berdasarkan hasil pendataan keluarga, pada saat itu sudah terhadap dua kelurahan di Kecamatan Batununggal yang membentuk Kampung KB karena telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sehingga inovasi-inovasi yang dirancang sebelumnya dapat tertuang melalui program Kampung KB. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan maka pemilihan Kelurahan Cibangkong sebagai Kampung KB

Kelurahan Cibangkong merupakan kelurahan dengan jumlah keluarga pra sejahtera terbanyak setelah Kelurahan Binong dan Maleer yaitu sebesar 133 KK (12,09%). Selain itu didapatkan pula hasil pendataan keikutsertaan ber KB dan rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menjadi

penentu Kelurahan Cibangkong sebagai lokasi Kampung KB.

Wilayah Kampung KB Cibangkong sendiri merupakan lokasi yang tepat berada di belakang salah satu pusat pembelajaran terbesar di Kota Bandung,

dalam hal itu terdapat kesenjangan sosial yang nyata terlihat ketika depan di depan Kampung KB Cibangkong tersusun pusat pembelajaran yang rapi, serta menjulang tinggi tembok pembatas yang semakin memperlihatkan kesenjangan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan terlebih Kampung KB Cibangkong merupakan daerah padat penduduk yang sangat jauh kondisi nya dengan pusat pembelajaran yang berada di dekatnya.

Dalam menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat ini ditinjau dari 3 aspek menurut noor, yaitu : *enabling* (menggali potensi masyarakat), *empowering* (mengelola, memanfaatkan potensi masyarakat agar menaikkan taraf hidup), *protecting* (perlindungan bagi masyarakat berupa regulasi hukum). Tujuan dari penulisan artikel adalah untuk menjelaskan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong, mengidentifikasi dan menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dari Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong, serta memberikan solusi agar pemerintah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong dengan baik.

Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (pedoman wawancara) dan

dokumentasi yang berupa dokumen asli tertulis, foto, video, serta rekaman suara selama penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan empat orang informan. Kemudian Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan identifikasi SWOT.

Hasil

Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kampung Kb Di Kelurahan Cibangkong (Studi Pada Kampung KB Ngahiji Cibangkong, Kota Bandung)

Program Kampung KB yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Januari 2016, merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional yang berfokus kepada pembangunan keluarga sejahtera dengan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung kepada masyarakat. Keluarga sejahtera didefinisikan dengan bebas kemiskinan, karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Bebas kemiskinan disini bukan berarti masyarakat perlu berpenghasilan tinggi, melainkan terkendalinya pengeluaran yang tidak melebihi pendapatan, dan dapat menemukan potensi diri masyarakat dalam mendapatkan pendapatan.

Pada sub bab ini, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong dengan meninjau 3 aspek dari Noor bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan beberapa aspek yang dijalankan. Berikut ini pemaparan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong. Sehingga

untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam program kampung KB, peneliti menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat oleh Noor berdasarkan aspek enabling, empowering, protecting.

4.2.1.1 Enabling (menggali potensi masyarakat)

Aspek pertama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah penggalian potensi masyarakatnya. Pada aspek ini berkaitan dengan pembentukan karakter masyarakat agar mengenali potensi yang mereka miliki. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hal yang perlu diketahui pertama kali ada menggali potensi masyarakat tersebut. Pada aspek ini masyarakat akan diberikan pemahaman mengenai penggalian potensi yang

Mereka miliki oleh para stakeholders. Penggalian potensi masyarakat ini berfungsi sebagai pengenalan terkait mengapa masyarakat perlu berdaya daerah. Materi sosialisasi yang diberikan dalam penggalian potensi masyarakat berkaitan dengan pentingnya kesadaran dari diri sendiri yang akhirnya akan menghasilkan keluarga berkualitas yang berdaya. Setelah sosialisasi tersebut dilaksanakan maka pergerakan selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan guna menyepakati pengembangan Kampung KB dengan pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) yang selanjutnya setelah Pokja terbentuk akan melaksanakan sosialisasi, identifikasi, pemetaan dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Serta tahapan Rencana Kerja Masyarakat tersebut merupakan bukti dari adanya pemberdayaan masyarakat, yang mana masyarakat disini tidak hanya diberi bantuan semata. Namun masyarakat dapat terjun

langsung sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disusun serta ditandatangani oleh Ketua Kampung KB Ngahiji Cibangkong serta Lurah Cibangkong yang selanjutnya akan diajukan kepada Pemerintah Daerah melalui pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Dokumen RKM tersebut minimal memuat materi tentang:

1. Dokumen berita acara terkait seleksi Kampung KB
2. Profil lokasi Kampung KB Ngahiji Cibangkong
3. Penentuan target pengguna kontrasepsi, pemberi pelayanan kesehatan, dan wilayah pelayanan
4. Pembentukan PokJa (kelompok kerja), Struktur Kepengurusan
5. Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART)
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) , rekening bank atas nama Kampung KB Ngahiji Cibangkong
7. Mekanisme pengelolaan data, informasi, dan keuangan
8. Rencana kerja, yang meliputi:
9. Rencana pelatihan bagi para pengurus, serta masyarakat
10. Rencana pelatihan bagi operator dalam input data
11. Rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasana
 - a. Rencana pengelolaan Kampung KB
 - b. Rencana monitoring dan evaluasi.
 - c. Penyusunan prioritas pemecahan masalah mana yang perlu didahulukan, sehingga didapatkan metode apa yang sesuai dengan permasalahan yang ada

d. SK Kampung KB oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya akan dikeluarkan SK dari lurah/camat masing-masing.

12. Berkenaan dengan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) merupakan hal paling penting dalam pembentukan Kampung KB. Dikarenakan perlu adanya ketepatan sasaran dalam dalam program-programnya, setiap daerah yang dijadikan Kampung KB tidak akan sama metode/teknik pembentukannya sesuai dengan prioritas mana yang perlu didahulukan. Untuk di Kampung KB Ngahiji Cibangkong memiliki permasalahan utama yaitu jumlah keluarga pra sejahteranya yang tinggi, dan keikutsertaan KB yang rendah. Penyebab dari permasalahan utama tersebut terdapat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap usia perkawinan yang ideal, serta masyarakat hanya melaksanakan pernikahan tanpa adanya perbekalan mengenai pelaksanaan keluarga sejahtera. Hal tersebut sangat berdampak bagi kehidupan pernikahan hingga mempunyai anak nantinya. Oleh karena itu, pada pembentukan Kampung KB Ngahiji Cibangkong diperlukan adanya metode pembentukannya yang fokus utama nya terhadap pembentukan keluarga sejahtera.

Setelah ditemukan permasalahan masyarakat yang menyebabkan ketidakberdayaan, maka masyarakat sudah mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga dalam menggali potensi masyarakat nya akan mudah. Masyarakat menyadari akan potensi mereka, potensi keinginan untuk berubah menjadi

jauh lebih baik. Sebetulnya, masyarakat Kampung KB memiliki rasa belajar yang tinggi, namun mereka kebingungan untuk memulai hal tersebut darimana serta memiliki keterbatasan dari segi dana, sarana serta prasana yang mumpuni.

Berdasarkan kelompok sasarannya, program dilaksanakan lebih fokus terhadap keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), masyarakat ,balita, remaja, dan lansia. Program yang diberikan seputar mengenai kesehatan, pendidikan, edukasi mengenai pernikahan, penggunaan alat kontrasepsi, kemudian mengenai usaha yang berpotensi dapat menaikkan taraf hidup.

Setelah melaksanakan sosialisasi serta pembentukan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya dimulai dengan pelaksanaan pemberian pendidikan bagi masyarakat guna menambah wawasan serta pengetahuan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kampung KB Ngahiji Cibangkong membuat pemerintah berinisiatif melaksanakan kegiatan gelar baca bagi anak-anak bersama dengan Yayasan Kebukit, tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kecerdasan bahasa serta meningkatkan minat baca melalui pembelajaran diluar kelas yang menyenangkan sehingga anak-anak nantinya tidak akan merasa bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan gelar bacaan ini dilaksanakan melalui permainan kreatif berbasis literasi.

Pemberian kegiatan gelar baca anak ini diselenggarakan dalam seminggu 3x yaitu pada hari senin, rabu, dan jumat. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai penggalian potensi khususnya para anak-anak, mengingat orang tua mereka yang masih saja ada yang tidak bersekolah sehingga kesulitan dalam

memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya.

Selain menyelenggarakan kegiatan gelar baca bagi anak-anak, kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan adalah kegiatan penggalian potensi diri pada remaja bersama tim Indo Competence. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki cita-cita bagi masadepan, selain itu. Para remaja pun diberikan pemahaman mengenai edukasi seksual.

4.2.1 Aspek Empowering (pengelolaan potensi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup)

Setelah dilaksanakannya penggalian potensi masyarakat, selanjutnya perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, fasilitas yang dapat meningkatkan taraf hidup. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam aspek ini yaitu seluruh kelompok sasaran langsung yaitu Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga, masyarakat, remaja, lansia dan balita serta untuk kelompok sasaran tidak langsung yaitu para tokoh agama.

Pengelolaan potensi masyarakat ini dimulai dari memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya membangun jiwa dan raga yang sehat. Pada tahapan ini berfungsi sebagai penyadaran bagi masyarakat apabila masyarakat yang berdaya itu tidak hanya dilihat dari ekonomi saja yang baik. Namun memiliki tubuh yang sehat merupakan aspek yang tidak kalah penting yang perlu dilaksanakan.

Masyarakat Kampung KB Ngahiji pada setiap awal bulan melaksanakan bulan posyandu, yang dibantu dengan para bidan serta fasilitas kesehatan. Bulan posyandu tersebut dilaksanakan guna memantau kondisi kesehatan ibu hamil maupun menyusui dan anak beserta peserta pengguna KB. kegiatan yang dilaksanakannya yaitu

berupa skrining perkembangan tumbuh kembang anak (berupa penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkaran kepala anak), pemberian imunisasi wajib (hepatitis B, polio, BCG, campak, dan DPT-HB-HIB), pemberian suplemen kepada ibu hamil dan menyusui, pemantauan status gizi (untuk mencegah terjadinya stunting), penyuluhan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pencegahan penyakit lainnya.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut sempat terhenti ketika masa pandemi sehingga, posyandu yang dilaksanakan pun ditiadakan menunggu himbauan pemerintah untuk dapat mengadakan kembali kegiatan. Sebagai gantinya posyandu dahlia melaksanakan kerja sama dengan pihak puskesmas serta bidan untuk memantau kondisi para ibu hamil dan anak-anak serta adanya pemberian suplemen dan vitamin.

Suplemen yang diberikan berupa Vitamin C, dan tablet penambah darah yang diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak dengan cara door to door. Para pengurus beserta PLKB Kampung KB melaksanakan pendistribusian berdasarkan data yang ada guna tepat sasaran. Selain dengan pendistribusian suplemen bagi ibu hamil dan anak-anak, para keluarga diwajibkan melaporkan kondisi kesehatannya selama masa pandemi kepada para pengurus Kampung KB Ngahiji bersama dengan faskes untuk melaksanakan pemantauan terhadap gizi dan kesehatan. Anggaran pada kegiatan tersebut dibantu dari APBD yang merupakan salah satu bentuk penanggulangan pandemi covid-19, pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung memberikan bantuannya berupa vitamin untuk menunjang kesehatan, beserta dengan pemberian penyuluhan dengan posyandu terkait.

Setelah pemberdayaan untuk ibu hamil, menyusui serta anak-anak dilaksanakan. Maka hal yang dilaksanakan selanjutnya adalah dengan memerhatikan para lansia yang merupakan sasaran langsung dari program Kampung KB. Kelompok usia masyarakat lansia tersebut ke dalam Bina Keluarga Lansia (BKL) Dahlia, masyarakat lansia tersebut tidak luput diperhatikan. Fokus utama untuk masyarakat lansia sendiri adalah untuk memelihara kesehatan serta menciptakan keluarga lansia yang tangguh. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap minggunya adalah senam lansia dan juga pemeriksaan kesehatan rutin.

Menyelenggarakan senam sehat lansia beserta pengecekan kesehatan untuk mencegah terjadinya osteoporosis yang rentan terjadi di usia para lansia. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, mengingat kondisi pandemi yang masih cukup tinggi. Perhatian kesehatan tersebut berfungsi untuk memonitoring kondisi daripada masyarakat kelompok usia lansia, terlebih kembali masyarakat lansia merupakan masyarakat yang rentan terkena penyakit.

Para kader tersebut sebelum mengkoordinir, dilaksanakan pelatihan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sehingga para kader tersebut sudah terlatih. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya penguatan keluarga lansia yang sehat, produktif, mandiri, dan inovatif. Para kader sudah terbentuk ketika program Kampung KB hadir, yang pada dasarnya para kader tersebut secara teori sudah paham terkait tupoksi mereka terlebih sebelum melaksanakan pelatihan terdapat penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung,

Setelah kondisi masyarakat Kampung KB Ngahiji Cibangkong dipastikan sehat, maka tentu akan mempermudah untuk menaikkan taraf hidup. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan potensi masyarakat dan daerah Kampung KB Ngahiji Cibangkong untuk meningkatkan ekonomi mereka. Masyarakat Kampung KB Ngahiji Cibangkong diberikan bantuan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung berupa benih lele. Pemberian benih lele tersebut diikuti dengan pemberian penyuluhan mengenai cara mengelola lele yang baik dan benar agar mendapatkan nilai jual yang tinggi, pemilihan lele dikarenakan dalam proses budidayanya cenderung jauh lebih mudah dibandingkan budidaya lainnya serta olahannya pun banyak disukai oleh masyarakat luar.

Pengelolaan olahan lele tersebut dipasarkan oleh UPPKS Himawari, selama proses budidaya tidak adanya kendala yang terlalu berat dalam artian budidaya lele ini berhasil dikembangkan sebagai potensi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Namun, kendala yang dihadapi adalah pada saat pemasaran yang mana pemasaran olahan lele ini baru dipasarkan ke daerah Cibangkong dan sekitarnya saja. Sehingga keuntungan yang didapatkan tidak mencapai target yang diharapkan. Hambatan yang dirasakan tersebut apabila tidak teratasi dengan cepat akan menimbulkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang akan mengakibatkan menumpuknya olahan produksi sehingga terjadi kerugian. Terlebih pada masa pandemi yang minat belinya semakin menurun.

Harapan masyarakat dalam menaikkan taraf hidup terutama untuk cadangan ketika masa pandemi ini semakin sulit, sehingga masyarakat bersama dengan UPPKS

Himawari bersepakat untuk melakukan diskusi bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memayungi program Kampung KB tersebut guna mendapatkan solusi. Masyarakat diminta untuk sementara waktu bersabar, solusi yang ditawarkan berupa adanya pelatihan pemasaran produk UMKM bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung guna dapat memasarkan produk olahan dengan tepat. Selain dengan pelatihan pemberian pemasaran, UMKM lainnya turut mendapatkan bantuan dana untuk semakin mengembangkan usahanya. Pelatihan tersebut dibagi beberapa sesi dalam waktu satu bulan dengan harapan masyarakat semakin mampu dalam meningkatkan perekonomian mereka. Produk yang diolah oleh masyarakat Kampung KB Ngahiji Cibangkong nantinya akan dipasarkan ke seluruh Kota Bandung hingga kawasan Jawa Barat lainnya, sehingga produk lokal dari Kampung KB Ngahiji ini akan semakin dikenal luas nantinya.

Selain pelatihan bagi UMKM dan untuk strategi memasarkan produk olahan, pelatihan selanjutnya dilaksanakan untuk keluarga akseptor melalui Kelompok UPPKA. Keluarga akseptor sendiri merupakan keluarga pengguna alat kontrasepsi.

4.2.2 Aspek protecting (perlindungan bagi masyarakat, agar berdaya)

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang sadar bahwa dirinya berharga. Masyarakat perlu diberikan rasa aman dalam melaksanakan aktifitasnya sehingga tidak merasa ada pihak yang jauh lebih tinggi ketika proses pemberdayaan berlangsung.

Masyarakat tersebut diberikan perlindungan berupa regulasi hukum untuk

melindungi segala hak dan kewajiban pemerintah bagi masyarakatnya. Dasar pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan pada Instruksi Presiden No.3/2022, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimal penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Apabila melihat tujuan dari transformasi tersebut maka sudah dapat dipastikan fokus utama pemerintah saat ini untuk memperkuat pemberdayaan bagi masyarakat melalui institusi keluarga yang damai, mandiri serta bahagia sehingga pada akhirnya dapat membantu terhadap pembangunan negara. Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tersebut diamanatkan kepada 13 Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengambilan putusan secara terkoordinasi sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diberikan dalam penyediaan dokumen kependudukan, data keluarga, meningkatnya cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, dan pembenahan lingkungan keluarga.

Baik masyarakat maupun pemerintah perlu adanya sama-sama saling menghormati hak masing-masing. Pada masyarakat Kampung KB Ngahiji Cibangkong masyarakat merasakan hak-hak nya sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan pada regulasi hukum Kampung KB. Sebagai contoh masyarakat mendapatkan regulasi hukum yang baik adalah ketika pada program-program yang diadakan. Masyarakat Kampung KB tidak merasa kebingungan dalam mencari dana, karena pada regulasi hukum yang dibentuk untuk Kampung Keluarga Berkualitas sudah jelas mengatur terkait pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman (Identifikasi SWOT) dalam Program Kampung KB melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong
Identifikasi SWOT merupakan salah satu teknik yang digunakan sebagai usaha dalam menemukan permasalahan dari segi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal di Kelurahan Cibangkong khususnya di Kampung KB Ngahiji Cibangkong dalam proses pemberdayaan masyarakat. Berikut ini paparan sederhana mengenai identifikasi SWOT tersebut:

Kekuatan (strengths)

1. Dapat menekan angka kelahiran yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan tingkat keluarga prasejahtera semakin tinggi.
2. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung sehingga program dapat terjalin 2 arah.
3. Program-program yang ada dapat memberdayakan masyarakat
4. Program Kampung KB ini sangat fleksibel sehingga tidak terikat oleh waktu
5. Antusiasme masyarakat yang tinggi.

Kelemahan (weakness)

1. Sulitnya regenerasi kepemimpinan Kampung KB.
2. Kepengurusan Kampung KB memiliki keterbatasan dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya pada input data secara elektronik,

3. Masyarakat mempertanyakan arah program Kampung KB mau seperti apa setelah mendapatkan penghargaan
4. Terkadang cash flow tidak lancar, sehingga beberapa program tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
5. Pengelolaan usaha masyarakat yang kurang reputasi sehingga belum stabil.

Peluang (opportunities)

1. Adanya komitmen kepala daerah (Walikota Bandung) untuk mendukung penuh program Kampung KB
2. Adanya dukungan dana dan penunjang lainnya untuk program dari CSR dan pihak Non-Government Organization (NGO) lainnya.
3. Sinergitas lintas sektor terlaksana secara optimal
4. Program-program yang telah ada tercantum pada RPJMN sehingga hanya perlu mengimplementasikan secara baik
5. Seluruh stakeholders yang terlibat turut serta berkomitmen dalam program Kampung KB ini
6. Pengurus Kampung KB Ngahiji Cibangkong memiliki ide untuk semakin memperlakukan potensi daerahnya melalui pembangunan kampung wisata .

Ancaman (threats)

1. Angka kemiskinan yang masih cenderung tinggi terlebih di era pandemi covid-19
2. Kompetisi antar Kampung KB yang ingin menjadi terbaik, sehingga program yang dicanangkan malah menyasar hanya untuk siapa yang

paling unggul agar mendapatkan penghargaan

3. Keterbatasan jumlah tenaga lini lapangan untuk Kampung KB Ngahiji Cibangkong sehingga proses monitoring dan evaluasi menjadi kurang efektif.

Rekomendasi Peneliti sebagai Solusi Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong

Berdasarkan penjelasan identifikasi SWOT (Strength, Weakness, Opportunities Threat) diatas, berikut ini merupakan rekomendasi dari peneliti sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program Kampung KB melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat sinergitas bersama dengan stakeholders yang terlibat, bertujuan untuk memperkuat proses pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji.
2. Mendukung penuh Kampung KB Ngahiji untuk dijadikan kampung wisata agar menjalin kerjasama dengan pihak eksternal sehingga masyarakat dapat mendapatkan sampingan dana sehingga dapat menaikkan taraf hidupnya
3. Meningkatkan kapasitas pelatihan bagi pengurus Kampung KB agar meningkatkan kemampuan dalam menginput data elektronik
4. Memasarkan produk lokal dengan memanfaatkan inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dibantu dengan pihak dinas terkait

5. Menambahkan jumlah tenaga lini lapangan untuk memonitoring dan mengevaluasi program, terutama tenaga lini lapangan yang non-pns sehingga memudahkan penambahan jumlah tenaga lini lapangan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Ngahiji Cibangkong sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat pada program Kampung KB di Kampung KB Ngahiji Cibangkong ini melalui beberapa aspek yaitu aspek *enabling*, *empowering*, dan *protecting* sebagai berikut:

1. *Enabling* (penggalian potensi masyarakat) dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok sasaran langsung, tidak langsung serta *stakeholders* terkait. Dalam aspek ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung memberikan terjun langsung dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui para kader. Pada aspek ini sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dari pemberian fasilitas bagi masyarakat dalam menemukan potensinya yang dibantu oleh para *stakeholders*.
2. *Empowering* (pengelolaan potensi masyarakat) dilaksanakan dengan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam menjadikan masyarakat berdaya.

Masyarakat sasaran langsung dari Program Kampung KB ini merupakan target dalam aspek ini, aspek *empowering* ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena masyarakat mendapatkan keterampilan untuk menjadikannya berdaya.

3. *Protecting* (memberikan perlindungan berupa regulasi hukum) dilaksanakan dengan membentuk regulasi hukum yang pasti dalam menjalankan program Kampung KB. Dari segi regulasi yang telah diberikan sudah cukup memberikan perlindungan bagi masyarakat, tinggal bagaimana dinas terkait bersama dengan para *stakeholders* mampu menjalankan sesuai dengan regulasi atau tidak.

Referensi

- Dr. H. Inu Kencana Syafii, M. (2003). PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN. Bandung: Refika Aditama.
- Finer, S. E. (1974). Comparative Government. Harmondsworth: Penguin Books.
- Isbandi Rukminto, Adi. 2008. Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhadam, L. (2011). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajagrafindo.

Najiyati, Sri. Dkk, 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.

Noor, M. (2011) ‘Pemberdayaan Masyarakat’, Jurnal Ilmiah Civis, 1(2), pp. 87– 99.

Hayati, N. (2020). The Role of Community Library Rumah Asa in Empowerment of Communities in Karangakjen Yogyakarta. KOLOKIUJURNAL Pendidikan Luar Sekolah, 8(1), 54–61. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v8i1.390>

Listya, H. (2010). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Institusi

Pragita, R. A. B., & Rembang, M. (2019). Persepsi Masyarakat tentang Pentingnya Keluarga Berencana di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat. 53(9), 1689–1699. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/32016/30402>

References:

Semua referensi yang digunakan dalam Angka Perceraian Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Diakses di: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/angka-perceraian-naik-paling-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/angka-perceraian-naik-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat#:~:text=Kasus%20perceraian%20di%20Jawa%20Barat,talak%20(diajukan%20pihak%20suami).)

banyak-terjadi-di-jawa-barat#:~:text=Kasus%20perceraian%20di%20Jawa%20Barat,talak%20(diajukan%20pihak%20suami). Diakses pada 10 Mei 2022 Pukul 16.00.

Laporan Kinerja MOTEKAR, Form Pelaporan Kinerja Motekar. Diakses di: sites.google.com/view/motekar Diakses pada 11 Mei – 10 Januari 2022.

Program Motivator Ketahanan Keluarga. Diakses di: <https://dp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/#>. Diakses pada 30 September – 03 Desember 2022

Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Diakses di: <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

Dokumentasi Kegiatan Motekar. Diakses di: <https://instagram.com/motekar.jabar>

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka aruna Bakti" Desa Sumera Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial Input, 49-57.

Firdaus Saleh, A. R. (2014). Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Jawa Barat. Bandung: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sunarti, E. (2020, Mei 14). Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga. Retrieved from IPB: <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2020/10/KAJIAN-R-IKK-KPPPA-SHORT-VERSION.pdf>

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 30 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018

Acknowledgment: